

Strategi Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu

Lia Ulvi Miranata Putri¹, Afrizal², Eki Darmawan³

^{1,2,3}Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Jl. Raya Dompok-Tanjungpinang-Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau 29115

Korespondensi penulis: liaulvimiranataputri@gmail.com

Abstract. *The maternal mortality is an obstacle in efforts to develop human resources because it can reduce the level of maternal health and community welfare. Cases of maternal deaths in Tanjungpinang City in 2023 have increased compared to 2022, bringing the total to six deaths. Problem in the health sector cannot be separated from the affairs of the regional government, in this case through the Tanjungpinang City Health, Population Control, and Family Planning Service. This research aims to analyse the strategies carried out by the Tanjungpinang City Government in efforts to reduce maternal mortality using Strategy Theory by Geoff Mulgan. The research method used was a qualitative research method with a case study approach was and a total of 11 informants. Data collection techniques were carried out using interviews and documentation and analysed by data collection, data reduction, and data presentation. The research results show that the Tanjungpinang City Government in 2023 has carried out activities related to efforts to reduce maternal mortality in accordance with its vision and mission. This activity involves the Community Health Centre and parties in the field to ensure that pregnant women are monitored and follow the directions given. The challenges faced by the Tanjungpinang City Government with the high maternal mortality in 2023 are the lack of knowledge of pregnant women regarding pregnancy, the low level of delivery which is not carried out in health facilities, and the lack of empowerment of families and communities regarding the KIA Book. Overall, the strategy implemented by the government must be supported by the role of the community as the recipient of the strategy so that the high maternal mortality rate in Tanjungpinang City in 2023 means that the reduction has not been optimal due to a lack of knowledge and community awareness.*

Keywords: *Maternal Mortality Rate, Government, Strategy.*

Abstrak. Kematian ibu menjadi hambatan dalam upaya pembangunan sumber daya manusia karena dapat menurunkan derajat kesehatan ibu dan kesejahteraan masyarakat. Kasus kematian ibu di Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 menjadi enam kasus kematian. Permasalahan di bidang kesehatan tidak lepas dari urusan pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam upaya penurunan angka kematian ibu menggunakan Teori Strategi oleh Geoff Mulgan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan jumlah informan 11 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi serta dianalisis dengan mengumpulkan data, reduksi data, dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang di tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan upaya penurunan angka kematian ibu sesuai dengan visi dan misi. Kegiatan tersebut melibatkan Puskesmas dan pihak-pihak di lapangan untuk memastikan bahwa ibu hamil terpantau dan mengikuti arahan yang diberikan. Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan tingginya angka kematian ibu pada tahun 2023, yaitu kurangnya pengetahuan ibu hamil terhadap kehamilan, adanya persalinan yang tidak dilakukan di fasilitas kesehatan, serta kurangnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat terhadap Buku KIA. Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan oleh pemerintah harus didukung dengan peran masyarakat sebagai pihak penerima strategi sehingga dengan tingginya angka kematian ibu di Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 mengartikan belum optimalnya penurunan angka kematian ibu yang disebabkan oleh kurangnya faktor pengetahuan dan kepedulian masyarakat.

Kata kunci: Angka Kematian Ibu, Pemerintah, Strategi

1. LATAR BELAKANG

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh negara-negara di dunia. Tingginya AKI berdampak pada kualitas kesehatan suatu negara

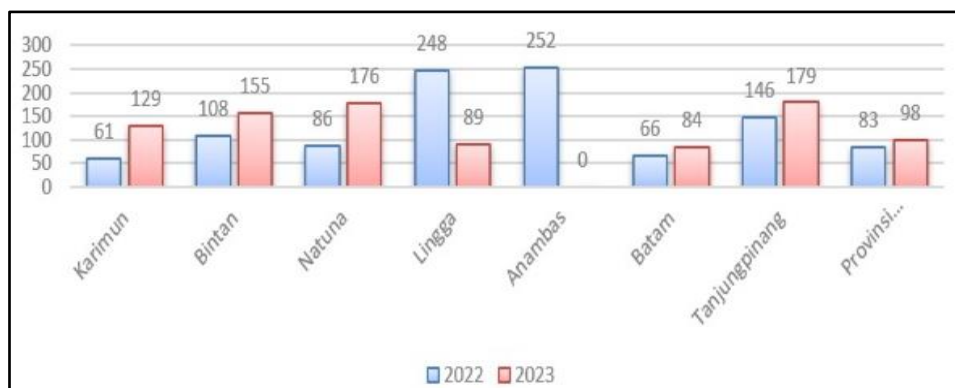
karena aspek kesejahteraan negara berhubungan dengan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di bidang kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) yang tinggi tersebut dapat menggambarkan kurangnya pelayanan dalam akses kesehatan (Sari et al., 2023). Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator pelayanan kesehatan dalam suatu negara yang pada umumnya disebabkan karena kurangnya persiapan persalinan dan kurangnya edukasi mengenai kehamilan (Cunha et al., 2022). Edukasi kesehatan merupakan bentuk perwujudan intervensi agar lebih efektif dan memberikan dampak positif terhadap kesehatan (Bolon, 2021). Tinggi atau rendahnya AKI pada suatu negara atau wilayah menjadi tolok ukur keberhasilan dari strategi yang dilakukan oleh negara atau wilayah tersebut. Berhasilnya penanganan masalah kesehatan ibu dan anak dianggap sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang karena menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas guna berkontribusi terhadap kemajuan bangsa.

Upaya dalam menurunkan AKI dapat melibatkan pemerintah daerah, *stakeholders*, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pemerintah daerah melakukan kolaborasi sebagai bentuk menggabungkan sumber daya dan keahlian yang dimiliki sehingga dapat mencapai penurunan AKI yang maksimal terutama pada lembaga kesehatan. Koordinasi antara pusat layanan, seperti Puskesmas dan klinik kepada rumah sakit rujukan untuk dapat dimaksimalkan agar terarah dengan baik dalam mendukung penurunan AKI. Strategi sebagai bentuk kinerja yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota/kabupaten, terutama dalam permasalahan anggaran. Pemberian strategi terdiri dari berbagai macam rencana atau pendekatan dalam mencapai tujuan. Terdapat dua fase dalam pemberian strategi agar lebih efektif, yaitu pihak terkait menginformasikan melalui pengarahannya dan masyarakat menuangkan pengetahuan yang telah diberikan di lingkungannya (Achyani et al., 2018).

Peraturan atau kebijakan yang ditetapkan dalam upaya penurunan AKI di Kota Tanjungpinang, yaitu Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 17 Tahun 2017. Latar belakang dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk mendukung penurunan AKI yang menjadi program prioritas nasional, pembentukan sistem surveilans terhadap ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas di Kota Tanjungpinang dengan tujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman kepada masyarakat dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi, serta mendukung program penurunan AKI melalui pengelolaan data dan informasi kesehatan ibu yang lebih baik di tingkat daerah (Peraturan Wali Kota Tanjungpinang, 2017). Pembentukan Tim Audit Maternal dan Perinatal (AMP) merupakan upaya konkret untuk menindaklanjuti penggunaan

surveilans agar memberikan dampak positif bagi kesehatan ibu dan anak dengan menyediakan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Tim AMP Kota Tanjungpinang merupakan bagian dari DKP2KB Kota Tanjungpinang melakukan rapat AMP dengan menghadirkan perwakilan dari Puskesmas dan rumah sakit sebagai bentuk kegiatan untuk menganalisis penyebab dan mencari solusi atas kasus kematian ibu di Kota Tanjungpinang. Memastikan mudahnya ibu hamil mendapatkan akses layanan kesehatan selama kehamilan sampai persalinan dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK) menjadi upaya dalam penurunan AKI di Kota Tanjungpinang. Pelaksanaan upaya tersebut tentunya tidak lepas dari tugas dan fungsi DKP2KB Kota Tanjungpinang.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2024.

Gambar 1. AKI Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2023

Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari jumlah AKI di tahun 2022. Berkaitan dengan hal tersebut, AKI di Kota Tanjungpinang turut mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, AKI di Kota Tanjungpinang terbilang cukup tinggi, namun pada tahun 2023 AKI di Kota Tanjungpinang bertambah dan Kota Tanjungpinang menjadi kota yang memiliki kasus AKI tertinggi, yaitu sebesar 179 per 100.000 kelahiran hidup dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, AKI di Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 belum mencapai target penurunan sesuai Rencana Strategis 2018-2023 DKP2KB Kota Tanjungpinang, yaitu 165,38 per 100.000 kelahiran hidup sehingga diperlukan strategi yang lebih intens agar di tahun selanjutnya AKI di Kota Tanjungpinang tidak berada di posisi tertinggi dari kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKP2KB) Kota Tanjungpinang merupakan instansi yang berperan dalam melaksanakan kegiatan dan program kepada ibu hamil sebagai upaya penurunan AKI. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana (DKP2KB) Kota Tanjungpinang memiliki tugas pokok untuk membantu Wali Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang merupakan tugas daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) (Peraturan Wali Kota Tanjungpinang, 2023). Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi permasalahan di bidang kesehatan yang membutuhkan strategi dari DKP2KB Kota Tanjungpinang dalam mengatasi permasalahan kematian ibu.

Tabel 1. AKI Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup (KH)	Jumlah AKI per 100.000 Kelahiran Hidup
2019	5 kasus	3821 KH	130,86
2020	4 kasus	3722 KH	107,50
2021	15 kasus	3530 KH	424,93
2022	5 kasus	3428 KH	145,9
2023	6 kasus	3348 KH	179,59

Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat, DKP2KB Kota Tanjungpinang, 2024.

Pada faktanya, AKI di Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 berada pada posisi tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Terdapat kematian ibu menggambarkan masih memiliki kendala pada pelaksanaan strategi di tahun 2023 dan belum terealisasi sepenuhnya dengan baik di Kota Tanjungpinang. Hal ini dapat dibuktikan dari data AKI di Kota Tanjungpinang dari tahun 2019-2023 yang mengalami keadaan naik turun. Tingginya AKI di Kota Tanjungpinang dikarenakan masih kurangnya pengetahuan ibu hamil dan keluarga dalam mendeteksi terjadinya masalah pada kehamilan serta kualitas lingkungan (Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, 2022). Sosialisasi dan penyuluhan diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil. Kegiatan-kegiatan tersebut harus diiringi dengan strategi lainnya guna memberikan keamanan pada kesehatan ibu hamil sampai setelah persalinan.

Berikut rumus yang digunakan dalam perhitungan jumlah AKI per 100.000 kelahiran hidup:

$$\text{Jumlah AKI per 100.000 KH} = \frac{\text{Jumlah Kematian Ibu}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 100.000$$

Berdasarkan uraian di atas, tingginya AKI di Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau menjadi fenomena yang diteliti. Jumlah kasus kematian ibu seharusnya menurun di tahun 2023 karena strategi yang dilakukan merupakan hasil evaluasi pelaksanaan strategi dan penyebab kematian ibu pada tahun 2022 yang sudah termasuk tinggi, namun data menunjukkan AKI di Kota Tanjungpinang mengalami kenaikan dan tertinggi dari seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Riau pada tahun 2023. Selain data tersebut, beberapa hal yang menjadi fenomena penyebab tingginya AKI di Kota Tanjungpinang adalah persalinan yang telah dibantu oleh tenaga kesehatan, tetapi masih dilakukan di rumah bukan di fasilitas kesehatan dan kurangnya pemberdayaan masyarakat atau keluarga ibu hamil mengenai fungsi dari Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, 2022). Hal inilah yang membutuhkan arahan dan tindakan dari DKP2KB Kota Tanjungpinang sebagai strategi untuk memastikan program dan kegiatannya dilakukan dengan baik tanpa ditemukan strategi yang tidak dijalankan atau kurang maksimal di lingkungan masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengeksplorasi implementasi program kesehatan masyarakat, seperti penelitian Fakhriyah dan kawan-kawan (2021), menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil penelitiannya adalah pemberian edukasi mengenai gizi untuk menghindari Kurang Energi Kronis (KEK) pada remaja di Kecamatan Aluh-aluh belum optimal, terdapat 58,3% remaja masih mengalami KEK yang merupakan salah satu penyebab kematian pada ibu (Fakhriyah et al., 2021). Sama halnya dengan penelitian Herlina dan kawan-kawan (2022), peran keluarga dalam mendukung Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di Yogyakarta sudah baik, namun masih terdapat beberapa kegiatan dalam upaya penurunan AKI yang belum dilaksanakan oleh pihak pelaksana (Herlina et al., 2022). Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis strategi pemerintah kota dalam upaya penurunan AKI menggunakan Teori Strategi oleh Geoff Mulgan, terutama dalam konteks program atau kebijakan di Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Strategi Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu”. Penelitian ini penting dilakukan agar dapat menjadi kontribusi dalam upaya prioritas peningkatan kesehatan dan pengetahuan ibu beserta keluarga melalui strategi yang dilakukan oleh DKP2KB Kota Tanjungpinang.

2. KAJIAN TEORITIS

Strategi

Strategi adalah perencanaan yang berisi langkah-langkah dalam mencapai tujuan sebagai bentuk pengarahan aktivitas yang dilakukan oleh lembaga dan berperan sebagai sarana pendukung, komunikasi, serta penentuan sasaran (Julia & Masyruroh, 2022). Terdapat pernyataan yang hampir sama, yaitu strategi dapat menjadi proses penentuan arah organisasi dalam mencapai misinya (Zamzami & Sahana, 2021). Selain itu, strategi merupakan rangkaian tindakan yang direncanakan secara sistematis untuk mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan (Anita, 2020). Strategi bukan hanya sebagai langkah atau tindakan, melainkan pola pikir yang dapat mengoptimalkan sumber daya, meminimalisir permasalahan, dan mencapai keberhasilan. Organisasi maupun lembaga menjadikan strategi sebagai perubahan yang direncanakan dengan melibatkan tiga langkah utama, seperti meningkatkan kapasitas masyarakat lokal, merancang kebijakan sosial yang efektif, dan melakukan tindakan nyata guna mencapai tujuan (Urbayatun et al., 2023).

Gambaran strategi kepada masyarakat lokal meliputi beberapa hal, yakni peningkatan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan, bebas dari segala bentuk kekerasan, dan terjaminnya stabilitas keamanan (Suaib, 2023). Suatu kebijakan atau program setidaknya mampu meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan memastikan pembangunan berkelanjutan (Wirata, 2022). Strategi tidak hanya terbatas pada program-program yang dilaksanakan oleh lembaga terkait, akan tetapi dalam menyinergikan berbagai program tersebut terdapat kebijakan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan strategi agar lebih terarah dan efektif (Lailia et al., 2021).

Strategi dianggap sebagai hal yang penting karena erat kaitannya dengan kinerja pemerintah. Pada pelaksanaan tugas maupun rencana kegiatan, pemerintah membutuhkan strategi agar rencana yang diupayakan dapat terealisasi dengan baik. Menurut Aos Kuswandi, pemerintah wajib menggunakan strategi yang dapat dimulai dengan membentuk sasaran atau target, arah kebijakan, dan rencana strategis sehingga mampu mendorong terciptanya masyarakat yang sejahtera (Kuswandi, 2020). Selain itu, menurut Taufan dan kawan-kawan, sasaran atau kebijakan yang dilakukan dengan adanya peran strategi akan memotivasi masyarakat melalui berbagai tindakan sehingga dapat meningkatkan kesadaran pada setiap individu (Amri et al., 2021). Artinya, pemerintah harus menjalankan rencananya secara strategis sesuai dengan perencanaan yang disusun untuk menghindari terjadinya kendala atau hambatan dalam penerapan strategi tersebut.

Terdapat teori strategi oleh Geoff Mulgan dalam bukunya yang berjudul “*The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good*”. Buku tersebut membahas cara pemerintah berpikir dan bertindak melalui pendekatan strategis, strategi yang efektif membutuhkan partisipasi berbagai pihak untuk melaksanakan tugas dan rencana agar sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, seorang ahli strategi publik perlu memahami cara mengatasi hambatan dan kecemasan dalam mengelola kekuasaan serta mengkoordinasikan pihak-pihak dalam organisasi sehingga dapat mencapai tujuan untuk kepentingan publik (Mulgan, 2009). Berhasil atau gagalnya suatu penerapan strategi dapat dianalisis melalui indikator dari teori strategi oleh Geoff Mulgan (2009:19), yaitu:

1. Tujuan (*purpose*) adalah bagian yang menjelaskan alasan dibentuknya suatu tindakan yang muncul karena didasari oleh kesenjangan antara kebutuhan dan publik yang khawatir dengan situasi yang terjadi;
2. Lingkungan (*enviromtent*) adalah tempat untuk melaksanakan tujuan dengan melakukan tindakan atau menyelesaikan sesuatu;
3. Pengarahan (*direction*) adalah bentuk sasaran dan hasil yang sesuai dengan keinginan sehingga menentukan arah apa yang ingin dicapai;
4. Tindakan (*action*) adalah bentuk hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui strategi, kebijakan, program yang rinci, kepemimpinan yang inspiratif dalam mendapatkan penilaian publik, dan berkomitmen pada tujuan, tindakan dapat memberikan dampak hasil yang tidak terduga pada saat diterapkan, sama halnya dengan strategi;
5. Pembelajaran (*learning*) adalah hal yang dilakukan bukan hanya untuk melihat apa saja yang menjadi faktor berhasil atau tidak, tetapi memikirkan kembali apa yang diperlukan dalam tujuan dan arah yang dipilih (Mulgan, 2009).

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan entitas yang menjalankan pemerintahan di tingkat lokal yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan (Rauf, 2018). Pemerintah daerah memiliki fungsi-fungsi sebagai bentuk merealisasikan kewenangan pada masyarakat, fungsi tersebut terdiri dari fungsi perlindungan, fungsi pelayanan, dan fungsi pembangunan (Fernanda et al., 2023). Pemerintah memiliki tiga urusan, yakni urusan pemerintah absolut merupakan urusan pemerintah yang tugasnya hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, urusan pemerintah konkuren merupakan urusan yang kewenangannya dibagi kepada pemerintah pusat, provinsi, dan daerah kabupaten/kota, serta urusan pemerintah umum merupakan urusan yang kewenangannya hanya dilakukan presiden,

kesehatan menjadi urusan pemerintah konkuren yang dilimpahkan ke pemerintah daerah (Kusnadi, 2020). Berdasarkan hal tersebut, telah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya dengan melihat fokus bidang dari fungsi pemerintahan yang dimiliki. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kesehatan guna mencegah terjadinya penyakit, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, dan perbaikan pada gizi masyarakat. Upaya kesehatan merupakan kegiatan atau program yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan agar dapat memulihkan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat (Rohili & Maliki, 2020).

Pemerintah daerah berperan dalam proses pelaksanaan desentralisasi di bidang kesehatan, bentuk pelaksanaan desentralisasi tersebut adalah pemerintah daerah mewujudkan upaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan berbagai upaya pendukung lainnya (Gunawan et al., 2021). Pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKP2KB) Kota Tanjungpinang merupakan lembaga yang menjalankan urusan kesehatan. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKP2KB) Kota Tanjungpinang memberikan strategi untuk meminimalisir segala bentuk permasalahan kesehatan terutama pada ibu hamil, yakni kematian ibu. Program atau kebijakan yang dijalankan DKP2KB Kota Tanjungpinang untuk menurunkan AKI sekaligus dijadikan sebagai panduan dalam menganalisis faktor penyebab kematian ibu agar nantinya dibentuk solusi dalam mengatasi permasalahan AKI.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian studi kasus. Jenis metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus digunakan pada penelitian ini karena metode kualitatif dapat memberikan gambaran suatu kondisi fenomena di lapangan dengan berhadapan langsung kepada pihak-pihak yang ditargetkan, sedangkan pendekatan studi kasus akan mengkaji satu fenomena tertentu sebagai fokus penelitian. Artinya, penelitian ini akan menemukan penjelasan atau jawaban mengenai strategi dalam upaya penurunan AKI melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang di tahun 2023. Penelitian ini terdiri dari 11 orang informan dan di analisis menggunakan Teori Strategi oleh Geoff Mulgan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Indikator Tujuan (*purpose*) dalam Upaya Penurunan AKI

Strategi pemerintah yang dapat dianalisis menggunakan indikator tujuan, yaitu misi dan bagaimana cara menjalankan misi tersebut. Tentunya dalam setiap strategi terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan dengan melibatkan berbagai kegiatan. Misi dalam penelitian ini adalah menurunkan AKI dengan terwujudnya kualitas kesehatan ibu yang baik sedangkan cara menjalankan misi adalah langkah yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan DKP2KB Kota Tanjungpinang tertuang dalam misi Kota Tanjungpinang, yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berbudaya, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global”, misi tersebut sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Tanjungpinang.

Seluruh bidang yang terdapat di DKP2KB Kota Tanjungpinang saling berkaitan dan memiliki fokus dalam mencapai penurunan AKI. Penurunan AKI dan AKB merupakan upaya perbaikan kesehatan yang memfokuskan kepada keluarga dan ibu. Setiap bidang di DKP2KB Kota Tanjungpinang memiliki fungsi masing-masing, misalnya di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan mencapai tujuan penurunan AKI dengan memperbaiki pelayanan kesehatan, seperti menyediakan fasilitas kesehatan, berupa Puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya. Bidang kesehatan masyarakat menjalankan tujuan dengan meningkatkan kesehatan ibu yang di mulai dari remaja agar remaja tersebut tidak mengalami anemia dan bagi ibu usia subur tidak mengalami Kurang Energi Kronis (KEK). Jadi, perbaikan kesehatan ibu hamil tidak hanya menurunkan *stunting* tetapi juga menurunkan AKI dan AKB. Selain itu, karena kematian ibu dapat disebabkan oleh penyakit-penyakit prioritas, seperti hipertensi, jantung, dan anemia sehingga terdapat bidang yang mencegah atau mengendalikan penyakit di DKP2KB Kota Tanjungpinang. Bidang-bidangnya adalah bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yang melakukan pencegahan hipertensi serta bidang kesehatan masyarakat yang melakukan pencegahan anemia.

Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui DKP2KB Kota Tanjungpinang mempunyai tujuan yang jelas untuk menurunkan AKI. Upaya penurunan AKI tersebut dimulai dari bidang-bidang yang terdapat di DKP2KB Kota Tanjungpinang yang saling berkaitan dalam menangani permasalahan kesehatan. Selain kepada Puskesmas, DKP2KB Kota Tanjungpinang melakukan konsultasi atau melibatkan beberapa pihak di pemerintahan guna menciptakan sinergi yang baik. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Ibu Nugraheni

selaku Sekretaris DKP2KB Kota Tanjungpinang yang menjelaskan bahwa penurunan AKI terdapat di visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungpinang sehingga menjadi prioritas penanganan karena masih tingginya AKI dan AKB di Kota Tanjungpinang. Konsultasi yang dilakukan oleh DKP2KB Kota Tanjungpinang dilakukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan (bappeda), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup, DPRD Kota Tanjungpinang, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, serta lembaga-lembaga vertikal yang sesuai dengan kesehatan keluarga dan kesehatan calon pengantin (catin).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam mencapai tujuan penurunan AKI, strategi-strategi pemerintah dilakukan dari remaja putri sampai dengan masa nifas melalui pemeriksaan, edukasi, dan berbagai kegiatan lainnya. Hal ini tertuang dalam “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual”. Peraturan tersebut menjadi acuan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam membantu mempersiapkan kesehatan sebelum hamil sampai dengan persalinan.

Temuan dari analisis indikator tujuan (*purpose*) dalam upaya penurunan AKI adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang atau DKP2KB Kota Tanjungpinang memiliki misi sesuai yang tertuang dalam misi Kota Tanjungpinang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, termasuk dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu hamil. Tercapainya misi tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang dimulai dari adanya tugas dari masing-masing bidang di DKP2KB Kota Tanjungpinang dalam menangani permasalahan masyarakat. Selain itu, terdapat peran dari UPTD, yakni Puskesmas, dengan melibatkan Bidan Kelurahan, serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berada di lingkup masyarakat. Dengan demikian, cara menjalankan misi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah dengan membentuk sinergi hingga terbentuk tim di kelurahan. Permasalahan yang ada di wilayah tersebut dapat di atasi dengan cepat karena pihak-pihak tersebut telah memahami bagaimana perannya dalam menguatkan strategi penurunan AKI.

Analisis Indikator Lingkungan (*enviromtent*) dalam Upaya Penurunan AKI

Strategi pemerintah yang dapat dianalisis menggunakan indikator lingkungan, yaitu dengan melihat bagaimana perubahan kondisi lingkungan setelah diterapkannya strategi. Masyarakat yang meliputi ibu hamil dan keluarga memahami apa tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Faktor-faktor yang mendukung lingkungan penurunan AKI dapat dilihat

berdasarkan faktor sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Terciptanya lingkungan yang mendukung penurunan AKI dapat melibatkan berbagai pihak yang tujuan akhirnya untuk memberikan edukasi kepada ibu hamil dan keluarga. Sistem lingkungan yang mendukung penurunan AKI tidak hanya dijalankan oleh DKP2KB Kota Tanjungpinang melainkan melibatkan lintas sektor dan lintas program. Lintas program di DKP2KB Kota Tanjungpinang memerlukan strategi dari setiap bidang sedangkan lintas sektor diperlukan dalam mewujudkan kepedulian masyarakat. Banyak keterlibatan pihak yang di mulai dari DKP2KB Kota Tanjungpinang hingga tokoh-tokoh di masyarakat dalam mengupayakan persalinan ibu yang terencana guna mencegah hal-hal buruk pada saat persalinan. Selain itu, keterlibatan ini berperan dalam mengantisipasi adanya penyakit-penyakit yang berpotensi menyebabkan kematian ibu.

Pertama, faktor sosial dapat dilihat dari adanya status pernikahan masyarakat yang tidak jelas sehingga menimbulkan masalah sosial, misalnya masalah rumah tangga dan hubungan keluarga yang buruk sehingga sulit untuk melibatkan keluarga dalam meningkatkan kepedulian terhadap ibu hamil. Contoh kepedulian tersebut, yaitu ikut serta mendampingi ibu hamil saat melakukan pemeriksaan dan mengingatkan ibu hamil tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kehamilan. Meskipun ibu hamil didampingi oleh suami atau keluarganya pada saat pemeriksaan kehamilan, apabila ibu hamilnya tidak peduli terhadap kesehatan kehamilannya maka upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendukung mental dan psikis ibu hamil menjadi sia-sia. Hal tersebut terjadi pada salah satu ibu hamil di Kota Tanjungpinang yang memiliki riwayat keguguran dua kali karena acuh tak acuh untuk melakukan pemeriksaan kehamilannya.

Kedua, faktor budaya, terdapat sebagian suku-suku tertentu di Kota Tanjungpinang yang masih percaya terhadap mitos kehamilan. Salah satunya dengan melarang ibu untuk makan telur pada saat setelah melahirkan, sementara telur berfungsi sebagai pemenuhan protein dan penyembuhan luka-luka. Selain makan telur, terdapat larangan tidak boleh makan ikan karena takut berpengaruh terhadap Air Susu Ibu (ASI) dengan anggapan ASI tersebut akan amis atau menyebabkan gatal. Hal inilah penting untuk dilakukannya kelas ibu hamil dan diikuti oleh ibu hamil, karena mitos-mitos tersebut telah dibahas di kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil merupakan wadah untuk diskusi dan memberikan masukan. Apabila terdapat hal yang menyimpang atau mitos yang dipercayai oleh ibu hamil maka pemahamannya akan diluruskan oleh tenaga kesehatannya.

Menurut Bidan Penyelia Puskesmas Mekar Baru terdapat ibu hamil yang masih mempercayai mitos di wilayah kerjanya. Mitos tersebut adalah ibu hamil dilarang makan

daging dan dilarang makan *seafood*. Beberapa masyarakat telah mengetahui yang benar dan sebagian kecil ada yang masih mempercayai mitos, seperti tidak boleh keluar rumah sebelum 40 hari, dilarang duduk di pintu karena dipercaya sebagai penyebab anaknya akan susah dilahirkan, dan berbagai mitos lainnya. Ibu hamil di Kota Tanjungpinang telah melakukan konsultasi kesehatan atau persalinan ke tenaga kesehatan sehingga sudah tidak ada ibu hamil yang meminta bantuan persalinan ke tenaga non kesehatan. Hal tersebut tentunya akan lebih baik apabila mitos dan konsultasi ke tenaga non kesehatan tidak dilakukan oleh seluruh ibu hamil. Edukasi dan konseling sebagai bentuk mengatasi mitos kehamilan bagi ibu hamil di Kota Tanjungpinang telah dilakukan Puskesmas Sei Jang sesuai dengan yang Ibu Ririk selaku Bidan Koordinator Puskesmas Sei Jang katakan bahwa Puskesmas melakukan penyuluhan tentang makanan yang baik pada saat hamil, setelah persalinan, dan sampai masa nifas. Puskesmas melakukan konseling saat ibu hamil memasuki trimester ketiga, konseling tersebut tentang KB, ASI, makanan, dan mitos-mitos sehingga pada saat ibu hamil telah melahirkan tidak akan berpengaruh terhadap hal-hal yang menyimpang, karena kepercayaan ibu hamil terhadap mitos berpotensi menghambat proses persalinan.

Ketiga, faktor pendidikan tidak selalu memengaruhi pola pikir dari masyarakat atau ibu hamil, dalam artian ada sebagian ibu yang pendidikannya rendah atau hanya menyelesaikan SMP atau SD tetapi tetap mengikuti arahan. Contohnya, terdapat ibu hamil yang hanya menyelesaikan pendidikan SD namun lebih pintar dalam mencari informasi dan sudah mulai bersosialisasi atau sudah memanfaatkan wahana untuk berkomunikasi, yaitu *handphone*. Faktor pendidikan tidak dilihat dari tinggi atau rendahnya tingkat pendidikan melainkan dari luasnya pengetahuan ibu dalam menjaga kesehatan kehamilan dan pemenuhan gizi selama kehamilan.

Keempat, sama halnya dengan faktor pendidikan, faktor ekonomi tidak selalu berpengaruh terhadap pemenuhan gizi ibu hamil. Akan tetapi, faktor ekonomi dapat menjadi tantangan seorang ibu hamil dalam memenuhi gizi kehamilannya. Salah satu contohnya, yaitu di wilayah kerja Puskesmas Mekar Baru pendapatan masyarakatnya masih berada di menengah ke bawah. Apabila terdapat masyarakat yang kurang mampu dan tidak bisa berobat, serta tidak memiliki BPJS maka akan diarahkan untuk mengurus ke dinas sosial. Terdapat mekanisme perwakilan yang mengurus ke dinas sosial di lapangan, yakni dimulai dari RT, lurah, dan kemudian langsung ke dinas sosial. Apabila dikategorikan masyarakat yang kurang mampu maka bisa mendapatkan pelayanan dari dinas sosial. Biasanya, dinas sosial akan memberikan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada keluarga yang membutuhkan.

Faktor-faktor tersebut tidak selamanya memengaruhi kesehatan kehamilan ibu hamil, karena semua akan kembali kepada ibu hamil sendiri untuk peduli dan memiliki rasa ingin tahu terhadap pentingnya menjaga kehamilan. Kelas ibu hamil sebagai wujud sasaran kegiatan kepada ibu hamil dengan melibatkan keluarga dari ibu hamil tersebut agar teredukasi. Pemahaman keluarga sangat penting terutama dalam pengambilan keputusan. Salah satu contohnya adalah ibu hamil harus rutin saat melakukan pemeriksaan dan memiliki perencanaan persalinan. Hal ini dibutuhkan karena kontribusi dari pemahaman keluarga sangat mendukung keberhasilan perubahan lingkungan ibu hamil menjadi lebih baik. Temuan dari analisis indikator lingkungan (*enviromtment*) mengindikasikan bahwa lingkungan masyarakat masih memiliki tantangan dari pengetahuan ibu hamil dan keluarga. Ibu hamil harus memahami kegiatan-kegiatan dan edukasi yang telah pemerintah lakukan, seperti memahami Buku KIA, melakukan pemeriksaan kehamilan, mengetahui permasalahan kehamilan, dan menghindari mitos-mitos kehamilan. Selain itu, faktor sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi, tidak selalu memengaruhi kondisi seorang ibu hamil.

Analisis Indikator Pengarahan (*direction*) dalam Upaya Penurunan AKI

Strategi pemerintah yang dapat dianalisis menggunakan indikator pengarahan adalah upaya yang dilakukan pemerintah baik itu berkoordinasi, pemberian motivasi, komunikasi, dan perintah. Pengarahan bidang kesehatan di Kota Tanjungpinang dimulai dari tingkat pusat, yaitu Kementerian Kesehatan (kemenkes). Pemerintah Kota Tanjungpinang memfasilitasi pertemuan dengan Puskesmas dan pihak-pihak terkait untuk membahas langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Dumasari selaku Staf Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat yang mengatakan bahwa setiap ada kegiatan dari kemenkes maka DKP2KB Kota Tanjungpinang akan menyampaikan melalui grup whatsapp yang didalamnya terdapat seluruh kepala Puskesmas, pihak rumah sakit, dan bidan di Kota Tanjungpinang.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKP2KB) Kota Tanjungpinang memiliki jejaring, yaitu Puskesmas. Puskesmas memiliki jejaring, yaitu bidan kelurahan dan Praktik Mandiri Bidan (PMB). Puskesmas melakukan koordinasi dalam hal pelaksanaan antenatal *care* (ANC), monitoring, evaluasi, dan pencapaian target ANC. Belum terdapat keterlibatan LSM yang memiliki fokus terhadap pencegahan kematian ibu di Kota Tanjungpinang, DKP2KB Kota Tanjungpinang hanya melibatkan organisasi-organisasi profesi, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (persagi), dan organisasi-organisasi profesi lainnya.

Susunan pelaksanaan strategi Pemerintah Kota Tanjungpinang dilakukan dengan melibatkan banyak koordinasi bersama pihak-pihak lain. Selain koordinasi, Puskesmas memiliki pertemuan tersendiri dengan mengkomunikasikan bagaimana program tersebut berjalan. Pertemuan ini melibatkan beberapa pihak seperti yang dikatakan oleh Ibu Armiyati selaku Bidan Penyelia Puskesmas Mekar Baru bahwa setiap bulan Puskesmas memiliki pertemuan tersendiri yang disebut lokakarya mini (lokmin) dengan melibatkan lintas sektor, RT, RW, kader, dan lurah, untuk membahas program internal Puskesmas, seperti program ibu, masalahnya, apa yang harus ditindaklanjuti, dan bagaimana menciptakan pelayanan yang baik.

Puskesmas juga memberikan perintah kepada ibu hamil untuk melakukan rujukan apabila persalinan tidak memungkinkan untuk dilakukan di Puskesmas dan harus dilakukan di rumah sakit. Ibu hamil yang dirujuk adalah ibu hamil yang berisiko, seperti ibu hamil yang memiliki hipertensi, detak jantung bayi tidak terdengar, dan berbagai risiko lainnya. Ibu Armiyati menjelaskan bahwa di Puskesmas Mekar Baru terdapat motivasi yang diberikan kepada ibu hamil pada saat akan bersalin. Rujukan merupakan salah satu bentuk edukasi yang diberikan dengan cara memotivasi ibu hamil untuk mengikuti arahan yang diberikan oleh Puskesmas sehingga proses tersebut sangat membantu dan menolong persalinan agar ibu dan bayi tersebut selamat. Arahan tersebut di terima oleh ibu hamil, yaitu Ibu Riri yang merupakan ibu hamil wilayah kerja Puskesmas Mekar Baru dan Ibu Yuli yang merupakan ibu hamil wilayah kerja Puskesmas Tanjungpinang. Arahannya adalah menaikkan Hb dan melakukan persalinan di rumah sakit karena persalinan pertama telah dilakukan tindakan *caesar* maka persalinan selanjutnya tidak boleh dilakukan di Puskesmas.

Salah satu tantangan di bidang kesehatan menurut informan di atas adalah pada saat menghadapi masyarakat yang *high class* atau masyarakat yang ekonominya di atas ekonomi menengah. Arahan yang dilakukan oleh berbagai pihak di bidang kesehatan ibu hamil tentunya sama dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Mengenai arahan, Ibu Dumasari selaku Staf Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mengatakan bahwa ibu hamil perlu memahami Buku KIA dan melakukan pemeriksaan minimal enam kali. Arahan dari pemerintah bahwa ibu hamil harus melakukan pemeriksaan dan Puskesmas akan mengetahui jumlah K1, K4, dan K6. Selain pemeriksaan tersebut, terdapat pemeriksaan penunjang pada ibu hamil, yaitu pemeriksaan labor.

Tabel 2. Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Ibu Hamil Tahun 2023

Puskesmas	Ibu Hamil			
	Jumlah	K1	K4	K6
Tanjungpinang	763	757	724	720
Batu 10	749	800	661	654
Melayu Kota Piring	382	410	459	368
Mekar Baru	568	579	566	541
Kampung Bugis	249	256	242	193
Sei Jang	655	710	668	668
Tanjung Unggat	215	244	232	231
Jumlah	3581	3756	3552	3375

Sumber: Profil Kesehatan Kota Tanjungpinang, 2024.

Berdasarkan data di atas, terdapat perintah yang disampaikan oleh DKP2KB Kota Tanjungpinang dan Puskesmas untuk memahami Buku KIA dan rutin melakukan pemeriksaan kunjungan, yaitu K1, K4, dan K6. Data tersebut mengartikan bahwa, ibu hamil yang berada di Kota Tanjungpinang mengikuti pemeriksaan namun kontribusi ibu hamil disetiap pemeriksaan mengalami penurunan. Puskesmas memiliki bidan yang memantau ibu hamil di wilayah kerjanya. Bidan ini disebut bidan kelurahan yang biasanya berada di lapangan atau di Puskesmas Pembantu (pustu). Puskesmas Mekar Baru melakukan koordinasi dengan bidan kelurahan sehingga menjalankan tugas secara bergantian. Puskesmas Mekar Baru dalam bersinergi melakukan sistem *rolling* setiap satu kali seminggu sehingga bidan Puskesmas bisa berada di Pos Kesehatan Kelurahan (poskeskel) dan Pondok Bersalin Desa (polindes). Hal ini dilakukan agar setiap bidan sama-sama merasakan, sama-sama tahu, dan sama-sama melihat kejadian di lapangan, karena pemerintah dan jejaringnya memiliki tujuan yang sama agar masyarakat terlayani, menjadi masyarakat yang sehat, serta mencegah kematian ibu, bayi, dan anak.

Puskesmas melakukan kunjungan kepada ibu hamil untuk memberikan edukasi sebagai bentuk pengarahan. Puskesmas juga berkoordinasi dengan TPK yang ada di kelurahan untuk mengetahui kondisi ibu hamil di wilayahnya. Jarang ditemukan ibu hamil di Kota Tanjungpinang yang menolak untuk di edukasi. Hanya saja, kontribusi ibu hamil dalam melaksanakan pemeriksaan secara rutin selama minimal enam kali tersebut masih belum terpenuhi. Kendala yang terjadi pada ibu hamil biasanya mengenai permasalahan tidak bisa datang ke Puskesmas pada saat waktu yang telah ditentukan. Tidak adanya keterlibatan LSM

di masyarakat yang langsung berfokus pada pencegahan kematian ibu, akan tetapi terdapat LSM yang menangani suatu penyakit yang bisa terjadi pada ibu hamil. Misalnya, ibu hamil tersebut mengalami HIV, sifilis, atau penyakit lainnya maka akan langsung dipantau oleh LSM dari pengendalian penyakit tersebut.

Temuan dari analisis indikator pengarahannya (*direction*) adalah DKP2KB Kota Tanjungpinang menyampaikan arahan yang diterima dari Kementerian Kesehatan apabila terdapat kegiatan baru. Arahan ini disampaikan kepada Puskesmas melalui pertemuan. Puskesmas telah melakukan koordinasi, perintah, dan motivasi kepada ibu hamil yang sebelumnya menolak atau terdapat kendala dalam mengikuti arahan kesehatan. Pengarahan melalui kebijakan wali kota belum terdapat di Kota Tanjungpinang. Hal ini dapat menjadi saran karena menurut Urbayatun dan kawan-kawan (2023), organisasi dan lembaga dapat menjadikan kebijakan sebagai strategi dengan melakukan perancangan kebijakan sosial yang efektif. Terdapat beberapa hal yang membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat atau ibu hamil di Kota Tanjungpinang masih perlu ditingkatkan, yaitu masih ditemukan ibu hamil yang melakukan penolakan atau kurang terbuka terhadap arahan yang diberikan, masih ditemukan ibu hamil yang belum rutin melakukan pemeriksaan kehamilannya, dan belum terdapat LSM di Kota Tanjungpinang yang memiliki fokus terhadap pencegahan kematian ibu.

Analisis Indikator Tindakan (*action*) dalam Upaya Penurunan AKI

Strategi pemerintah yang dapat dianalisis menggunakan indikator tindakan (*action*) mengenai penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, atau kegiatan tertentu yang dilakukan dalam upaya penurunan AKI. Indikator tindakan memiliki tiga sub-indikator, yaitu kondisi masyarakat, aktivitas yang dilaksanakan, dan proses pengambilan keputusan. Kegiatan sebagai strategi ini terjadi karena adanya bentuk pembinaan yang dilakukan oleh DKP2KB Kota Tanjungpinang kepada Puskesmas. Puskesmas melakukan kegiatan yang berhubungan dengan ibu hamil secara langsung karena Puskesmas memiliki wilayah sedangkan DKP2KB Kota Tanjungpinang hanya melakukan pemantauan, pengarahannya, koordinasi, evaluasi, dan monitoring.

Kegiatan intervensi yang dilakukan di lapangan atau di lingkungan masyarakat menjadi tugas Puskesmas. Puskesmas memiliki wilayah kerjanya masing-masing dan memiliki kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya penurunan AKI. Sebelum berfokus pada kegiatan, kepala Puskesmas diawasi oleh DKP2KB Kota Tanjungpinang pada setiap pelaksanaan strategi penurunan AKI. Pelaksanaan strategi pemerintah dalam penurunan AKI dimulai saat adanya catin sampai ibu hamil dengan masa nifasnya sesuai dengan “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual”. Berikut penjelasan pelaksanaan strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya penurunan AKI tahun 2023 di Kota Tanjungpinang:

Pertama, strategi pencegahan kematian ibu di mulai pada saat adanya catin yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum melaksanakan pernikahan. Pemeriksaan kesehatan ini penting terutama bagi catin perempuan yang nantinya akan hamil. Permasalahan kesehatan, seperti anemia dan gizi kurang merupakan beberapa permasalahan kesehatan yang dapat berpotensi menyebabkan kematian ibu serta anak yang lahir akan mengalami *stunting*. Hal ini dikarenakan, kesiapan untuk hamil dan melahirkan adalah bagian yang mendukung strategi penurunan AKI yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Ibu Armiyati selaku Bidan Penyelia Puskesmas Mekar Baru mengatakan bahwa Puskesmas melakukan skrining kepada catin sebagai bentuk kegiatan untuk meningkatkan kesehatan ibu dalam mencegah kematian.

Calon pengantin (catin) di Kota Tanjungpinang masih banyak memiliki permasalahan kesehatan. Pada saat dilakukan skrining kesehatan, catin diberikan edukasi untuk memperbaiki permasalahan kesehatan yang dialami sampai layak untuk melaksanakan pernikahan. Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Puskesmas melakukan pemeriksaan labor untuk mengetahui apakah catin tersebut memiliki HIV, sifilis, dan pemeriksaan hemoglobin darahnya untuk mengetahui apakah catin perempuan tersebut mengalami anemia dan kekurangan zat besi.

Tabel 3. Tabel Jumlah Calon Pengantin Perempuan Anemia dan Gizi Kurang Tahun 2023

Puskesmas	Jumlah Catin Terdaftar (L+P)	Catin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (L+P)	Catin Perempuan Anemia	Catin Perempuan Gizi Kurang
Tanjungpinang	284	230	5	7
Batu 10	576	576	16	2
Melayu Kota Piring	228	224	0	0
Mekar Baru	226	226	17	15
Kampung Bugis	200	126	12	5
Sei Jang	912	466	8	21
Tanjung Unggat	160	228	0	0
Jumlah	2586	2076 (80,3%)	58 (5,6%)	50 (4,8%)

Sumber: Profil Kesehatan Kota Tanjungpinang, 2024.

Pada tahun 2023, terdapat 58 orang catin perempuan yang mengalami anemia dan 50 orang catin perempuan yang memiliki gizi kurang. Puskesmas di Kota Tanjungpinang telah melakukan kegiatan skrining sebagai upaya dalam memastikan catin perempuan tersebut benar-benar sehat dan siap untuk menikah. Oleh karena itu, pelaksanaan strategi dalam upaya penurunan AKI di Kota Tanjungpinang telah dilakukan pemerintah yang dimulai dari pemeriksaan kesehatan catin.

Kedua, setelah catin tersebut layak untuk menikah maka hal tersebut juga mengartikan bahwa catin perempuan tersebut layak untuk hamil. Pada saat hamil, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kembali terkait kehamilannya minimal enam kali selama kehamilan. Puskesmas memberikan penyuluhan dan edukasi mengenai pelaksanaan persalinan di fasilitas kesehatan yang mempunyai peralatan dan petugas medis yang sesuai dengan standar WHO. Puskesmas membekali ibu hamil untuk mempersiapkan siapa pendonor darahnya, ambulans desanya, dan siapa yang akan mendampingi saat melahirkan. Selain itu, perlu menyiapkan tabungan atau BPJS, apabila ibu hamil tidak memiliki BPJS maka pemerintah memiliki program, yakni Jaminan Persalinan (jampersal). Ibu hamil yang kurang mampu bisa melapor ke dinas sosial agar mendapatkan pelayanan kesehatan seperti ibu hamil lainnya. Permasalahan yang biasanya terjadi di Kota Tanjungpinang, yaitu pada saat ibu hamil akan melakukan persalinan tetapi tidak ada keluarga yang mendampingi sehingga ibu hamil menunda untuk mengunjungi fasilitas kesehatan dan terjadi persalinan yang dilakukan di rumah bukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Kegiatan penyuluhan kepada ibu hamil merupakan salah satu bentuk edukasi. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah penyuluhan perawatan berkala pada ibu hamil di awal tahun, kelas ibu hamil dilakukan selama empat kali pertemuan, dan kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP) yang dilakukan setiap triwulan sekali. Selain pada penyuluhan, edukasi yang dilakukan secara individu juga dilakukan Puskesmas kepada ibu hamil pada saat ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilannya. Puskesmas Sei Jang memiliki kegiatan konseling yang menghadirkan ibu hamil untuk melakukan tanya jawab mengenai kehamilan dan Buku KIA agar meningkatkan pemahaman ibu hamil terhadap kehamilannya. Kegiatan penyuluhan pada ibu hamil tidak hanya dilakukan di Puskesmas. Bidan koordinator atau bidan kelurahan melakukan kunjungan kepada ibu hamil KEK sekaligus memberikan edukasi. Setiap bulannya terdapat kegiatan antara DKP2KB Kota Tanjungpinang dan Puskesmas. Selain itu, Puskesmas memiliki lokakarya mini (lokmin) yang dilakukan setiap bulan, lokmin adalah rapat internal yang melibatkan RT, RW, kader, dan lurah untuk membahas permasalahan ibu. Puskesmas mememantau ibu hamil yang berisiko, contohnya ibu hamil dengan risiko tinggi akan dipantau

1-2 minggu sekali sedangkan risiko sangat tinggi akan dipantau 1-2 hari. Risiko tinggi ditandai dengan ibu hamil yang memiliki darah tinggi, kencing manis, dan penyakit jantung.

Bidan koordinator merupakan salah satu bagian dari Puskesmas yang mengetahui kejadian di lapangan berdasarkan informasi dari bidan kelurahan. Kinerja bidan koordinator diawasi oleh DKP2KB Kota Tanjungpinang dengan memastikan kepada kepala Puskesmas. Setiap pemeriksaan ibu hamil, Puskesmas mengimbau agar ibu hamil datang dengan didampingi oleh keluarganya. Pada saat ibu hamil diperiksa dan apabila memiliki lingkaran lengan atas (LILA) yang kecil atau kurang dari 23,5 cm serta memiliki anemia maka ibu hamil tersebut akan menerima PMT. Ukuran LILA ibu hamil kurang dari 23,5 cm merupakan ibu hamil yang berisiko KEK yang berdampak pada bayi yang dilahirkan akan memiliki berat badan lahir rendah, memiliki risiko kematian, gizi kurang, serta mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, terdapat program pemerintah, yaitu Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yang mengharuskan ibu hamil untuk mempersiapkan beberapa hal, seperti tempat persalinan, golongan darah, dan siapa yang akan menjadi pendonor.

Tabel 4. Pemberian Susu Kepada Ibu Hamil KEK Tahun 2023

Nama Puskesmas	Jumlah Ibu Hamil KEK	
	Tahap 1	Tahap 2
Puskesmas Tanjungpinang	4 orang	4 orang
Puskesmas Kampung Bugis	5 orang	5 orang
Puskesmas Sei Jang	12 orang	9 orang
Puskesmas Melayu Kota Piring	11 orang	8 orang
Puskesmas Mekar Baru	10 orang	16 orang
Puskesmas Tanjung Unggat	13 orang	10 orang
Puskesmas Batu 10	15 orang	15 orang
Total:	70 orang	67 orang

Sumber: Seksi Kesga dan Gizi Masyarakat, DKP2KB Kota Tanjungpinang, 2024.

Pemberian bantuan makanan dan susu kepada ibu hamil KEK memberikan dampak baik yang ditandai dengan adanya penambahan lingkaran lengan atas dan penambahan berat badan. Penyaluran PMT dilakukan setiap hari dengan mengunjungi rumah ibu hamil, Puskesmas memantau dan melakukan pengukuran untuk melihat penambahan lingkaran lengan atas dan penambahan berat badan. Makanan yang terdapat pada program ini ada nuget yang berasal dari

olahan tahu, ayam, tempe, dan wortel. Penyaluran PMT tersebut dilakukan 1-2 bulan, bantuan lain yang diterima ibu hamil ada susu, buah-buahan, beras, telur, dan kacang hijau. Pemberian makanan ini berfungsi untuk memperbaiki status gizi pada ibu hamil dan memberikan edukasi kepada keluarga dalam menyiapkan makanan bergizi. Akan tetapi, hal ini turut menjadi tantangan karena rata-rata ibu hamil hanya menerima bantuan yang diberikan tanpa menjadikan bantuan tersebut sebagai pedoman perbaikan gizinya.

Fasilitas yang dimiliki oleh Pukesmas turut mendukung mudahnya ibu hamil saat menerima pelayanan. Puskesmas Mekar Baru belum memiliki tempat bersalin karena terbatas oleh ruangan yang dimiliki. Meskipun demikian, Puskesmas Mekar Baru tetap menerima persalinan apabila kondisi ibu hamil darurat. Puskesmas selalu meningkatkan fasilitas yang dimiliki guna mendukung penurunan permasalahan penyakit di Kota Tanjungpinang, termasuk kematian ibu. Ibu hamil yang tinggal di Kota Tanjungpinang, masih banyak menganggap remeh pemeriksaan kehamilan dan tidak mengunjungi posyandu ibu hamil karena memiliki anggapan bahwa jarang ada program ibu hamil di posyandu tersebut.

Tabel 5. Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Ibu Nifas Tahun 2023

Puskesmas	Ibu Bersalin/Nifas			
	Jumlah	Persalinan di Fasyankes	KF1	KF Lengkap
Tanjungpinang	728	702	702	702
Batu 10	715	646	647	620
Melayu Kota Piring	365	400	396	384
Mekar Baru	542	538	538	532
Kampung Bugis	238	210	197	210
Sei Jang	626	630	631	631
Tanjung Unggat	205	222	221	210
Jumlah	3419	3348 (97,9%)	3332 (97,5%)	3289 (96,2%)

Sumber: Profil Kesehatan Kota Tanjungpinang, 2024.

Data tersebut menunjukkan bahwa ibu hamil yang melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, kunjungan nifas pertama dan kunjungan nifas lengkap belum mencapai 100%. Artinya, masih terdapat ibu hamil yang tidak melakukan persalinan di fasilitas kesehatan

dan belum terpenuhinya kunjungan nifas pada ibu bersalin. Hal ini biasanya terjadi karena keadaan darurat sehingga ibu hamil melakukan persalinan di rumah meskipun tetap dibantu tenaga kesehatan. Kejadian seperti ini tidak dibenarkan karena apabila terjadi maka Puskesmas dan DKP2KB Kota Tanjungpinang akan mengidentifikasi penyebab persalinan yang tidak dilakukan di fasilitas kesehatan tersebut karena menimbulkan tantangan dalam mencapai target indikator kinerja.

Temuan dari analisis indikator tindakan (*action*) adalah DKP2KB Kota Tanjungpinang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Puskesmas. Puskesmas telah melakukan kegiatan-kegiatan yang terdiri dari penyuluhan dan edukasi yang dilakukan mulai dari catin sampai dengan ibu hamil tersebut bersalin dan nifas. Pengetahuan ibu hamil menjadi tantangan pada indikator tindakan, terdapat ibu hamil hamil yang tidak mengikuti penyuluhan, posyandu ibu hamil, tidak terbuka untuk dikunjungi, tidak rutin melaksanakan pemeriksaan kehamilan, kurang persiapan dalam persalinan, dan tidak menjadikan PMT sebagai panduan dalam memenuhi gizi. Mengenai fasilitas Puskesmas, hanya beberapa Puskesmas yang memiliki tempat bersalin, yaitu Puskesmas Tanjungpinang, Puskesmas Kampung Bugis, dan Puskesmas Melayu Kota Piring. Selain itu, pengetahuan masyarakat atau ibu hamil masih perlu ditingkatkan.

Analisis Indikator Pembelajaran (*learning*) dalam Upaya Penurunan AKI

Strategi pemerintah yang dapat dianalisis menggunakan indikator pembelajaran (*learning*) adalah cara dalam mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan strategi. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam upaya penurunan AKI dilihat dari inovasi kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya. Selain itu, kualitas strategi tergantung pada pengetahuan yang diterima oleh ibu hamil atau masyarakat. Ibu Nugraheni selaku Sekretaris DKP2KB Kota Tanjungpinang mengatakan setiap kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan AKI akan diidentifikasi kembali mengenai penyebab, fasilitas, serta dampak pemberian edukasi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengadakan pertemuan evaluasi program yang dihadiri oleh pemberi pelayanan pada fasilitas kesehatan, Puskesmas, dan rumah sakit. Pembahasan evaluasi ini akan dimulai dari target indikator. Setiap tahunnya Puskesmas memiliki sasaran yang telah ditetapkan oleh DKP2KB Kota Tanjungpinang dan melakukan rapat evaluasi setiap satu tahun. Tentunya, setiap Puskesmas akan berusaha memenuhi kebutuhan fasilitas yang belum tersedia, contohnya adalah Puskesmas Sei Jang yang akan membuka tempat persalinan di tahun 2025. Puskesmas memiliki akreditasi yang merupakan bentuk penilaian apakah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Tabel 6. Akreditasi Puskesmas di Kota Tanjungpinang Tahun 2021-2023

No	Puskesmas	Status Akreditasi		
		2021	2022	2023
1	Tanjungpinang	Utama	Utama	Paripurna
2	Batu 10	Paripurna	Paripurna	Paripurna
3	Melayu Kota Piring	Dasar	Dasar	Utama
4	Mekar Baru	Madya	Madya	Utama
5	Kampung Bugis	Madya	Madya	Utama
6	Sei Jang	Utama	Utama	Paripurna
7	Tanjung Unggat	Utama	Utama	Paripurna

Sumber: Profil Kesehatan Kota Tanjungpinang, 2024.

Akreditasi Puskesmas tersebut menggambarkan peningkatan keunggulan Puskesmas di setiap tahunnya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Urutan akreditasi pada Puskesmas dari yang paling bawah, yakni tidak terakreditasi, akreditasi dasar, akreditasi madya, akreditasi utama, dan akreditasi paripurna atau akreditasi penuh. Tidak hanya Puskesmas Sei Jang, Puskesmas Mekar Baru belum memiliki tempat persalinan namun memiliki tempat persalinan apabila darurat. Evaluasi selain kepada fasilitas yang terdapat di Puskesmas, Puskesmas juga menciptakan inovasi di setiap tahunnya. Tahun 2023 beberapa Puskesmas melaksanakan inovasi yang dibentuk agar lebih menguatkan penerapan strategi sehingga terealisasi dengan baik. Puskesmas Sei Jang memiliki inovasi dengan melakukan pendampingan ibu hamil sampai ke rumah sakit. Puskesmas Tanjungpinang memiliki inovasi dengan menciptakan kegiatan senam ibu hamil. Puskesmas Mekar Baru memiliki inovasi yang lebih mengarah kepada pemanfaatan sosial media dalam menambah wawasan dan pengetahuan. Puskesmas Batu 10 memiliki inovasi, yaitu adanya Kelompok Peduli Ibu Hamil (pokdumil) yang melibatkan kerja sama dengan kader di lapangan.

Meskipun telah memiliki inovasi, Puskesmas memiliki tantangan tersendiri pada ibu hamil. Tantangan di indikator pembelajaran lebih kepada permasalahan ibu hamil. Pemerintah telah melakukan evaluasi dengan mengadakan pertemuan dan rapat untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan. Temuan dari analisis indikator pembelajaran (*learning*) adalah DKP2KB Kota Tanjungpinang melakukan evaluasi terhadap kasus kematian ibu dengan melakukan kegiatan AMP dan membentuk inovasi. Pada kegiatan AMP ini, DKP2KB Kota Tanjungpinang akan mengidentifikasi berbagai penyebab kematian bersama pihak Puskesmas,

rumah sakit, dan lain-lain. Puskesmas turut memperbaiki dan meningkatkan akreditasinya agar meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah Kota Tanjungpinang telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya penurunan AKI di Kota Tanjungpinang. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan kembali oleh UPTD Puskesmas sebagai bentuk koordinasi yang dilakukan oleh DKP2KB Kota Tanjungpinang. Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan tingginya AKI pada tahun 2023 disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ibu hamil terhadap kehamilannya, adanya persalinan yang dilakukan di rumah bukan difasilitas kesehatan, serta kurangnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat terhadap Buku KIA.

Kesimpulan dari penelitian ini memunculkan saran untuk Pemerintah Kota Tanjungpinang, yaitu *pertama* Pemerintah Kota Tanjungpinang sebaiknya berkomitmen untuk meningkatkan sinergi dan pengawasan yang lebih efektif bersama seluruh pihak yang turut menjalankan misi sehingga setiap program yang dilaksanakan dapat mencapai hasil optimal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, *kedua* mengoptimalkan kualitas hidup masyarakat dengan melakukan kajian mendalam terhadap tantangan pada faktor sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang memengaruhi perilaku kesehatan ibu hamil, *ketiga* Pemerintah Kota Tanjungpinang sebaiknya merancang dan mengesahkan peraturan wali kota yang efektif dalam menciptakan prosedur pelaksanaan kegiatan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), serta memperluas jejaring kerja sama dengan LSM selain kepada organisasi profesi dan LSM pengendalian penyakit.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan ibu hamil, keluarga, dan masyarakat, kurang peduli terhadap kesehatan ibu hamil. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya agar meneliti tentang pemberdayaan masyarakat dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan pada saat penelitian ini dilakukan, didapatkan informasi bahwa banyak keterlibatan pemerintah atau lintas sektor sehingga disarankan bagi peneliti berikutnya untuk meneliti kolaborasi pemerintah dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dengan memperluas informan, periode penelitian, dan data yang digunakan lebih banyak sehingga dapat dilakukan perbandingan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan upaya yang dilakukan melalui kolaborasi pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih peneliti ucapkan kepada Allah SWT. atas karunia dan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan penulisan artikel ini. Terima kasih kepada kedua orang tua peneliti yang selalu mendoakan peneliti. Terima kasih kepada kedua dosen pembimbing peneliti, yaitu Bapak Dr. Afrizal, S.IP., M.Si. dan Bapak Dr. Eki Darmawan, S.Sos., M.IP. yang telah memberikan arahan dan masukan dalam membimbing penulisan artikel dan skripsi peneliti. Terima kasih kepada seluruh informan yang telah membantu peneliti serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Artikel ini merupakan bagian dari skripsi peneliti yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP.).

DAFTAR REFERENSI

- Achyani, Noor, R., & Wibowo, S. B. (2018). Model Intervensi Komunitas (Menciptakan Masyarakat yang Sadar Lingkungan Wisata). CV. Laduny Alifatama.
- Amri, U., Hendri, Rusdinal, & Gistituati, N. (2021). Perilaku dan Pengembangan Organisasi Pendidikan *Review Disain Intervensi*. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 3(4), 1543–1549. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i4.605>
- Anita, D. (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Pembangunan Pedesaan. *Jurnal JIPS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, 4(2), 29–33.
- Bolon, C. M. T. (2021). Pendidikan & Promosi Kesehatan. UIM Press.
- Cunha, T. S. da, Irman, O., & Aran, M. L. B. (2022). Edukasi Terstruktur terhadap Persiapan Persalinan Ibu Primigravida. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 3(2), 193–199.
- Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang. (2022). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Fakhriyah, Isnaini, Noor, M. S., Putri, A. O., Fitriani, L., Abdurrahman, M. H., & Qadrinnisa, R. (2021). Edukasi Remaja Sadar Gizi untuk Pencegahan Kekurangan Energi Kronik (KEK) dalam Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Wilayah Lahan Basah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(1), 499–503.
- Fernanda, M., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3), 2409–2418. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5423>
- Gunawan, G. R. A., Ananda, N., & Imtiyaz, S. L. (2021). Pelaksanaan Program Penurunan Angka Kematian Ibu di Masa Pandemi COVID-19. <https://doi.org/https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31231.94887>
- Herlina, S. M., Ulya, Y., & Yunika, R. P. (2022). Peran Keluarga terhadap Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi dalam Menurunkan

- Angka Kematian Ibu. *Journal of Midwifery*, 10(2), 112–120.
- Julia, M., & Masyuroh, A. J. (2022). *Literature Review* Determinasi Struktur Organisasi: Teknologi, Lingkungan, dan Strategi Organisasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(4), 383–395.
- Kusnadi, I. H. (2020). Implikasi, Urusan dan Prospek Otonomi Daerah. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 33–43.
- Kuswandi, A. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(2), 91–113. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817>
- Lailia, I., Kismartini, & Rahman, A. Z. (2021). Peran *Stakeholders* dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif di Kota Semarang. *Journal of Public and Management Review*, 10(3), 194–207.
- Mulgan, G. (2009). *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good*. OUP Oxford.
- Peraturan Wali Kota Tanjungpinang. (2017). Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Surveilans Aktif Ibu Hamil Ibu Bersalin dan Ibu Nifas.
- Peraturan Wali Kota Tanjungpinang. (2023). Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Rauf, R. (2018). Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan). NusaMedia Yogyakarta.
- Rohili, A., & Maliki, A. (2020). Peranan Pemerintah Kota dalam Meningkatkan Kesehatan di Lingkungan Kota. *International Journal Administration, Business and Organization*, 1(3), 27–35.
- Sari, I. P., Sucirahayu, C. A., Hafilda, S. A., Sari, S. N., Safithri, V., Fitria, Febriana, J., & Hasyim, H. (2023). Faktor Penyebab Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi serta Strategi Penurunan Kasus (Studi Kasus di Negara Berkembang): *Sistematic Review*. Prepotif Jurnal Kesehatan Masyarakat, 7(3), 16578–16593.
- Suaib. (2023). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (U. Nain (ed.)). CV. Adanu Abimata (Adab).
- Urbayatun, S., Yunita, N., Sari, I. K., Hidayati, E., Azzara, L. F., Purnamasari, A., Aliza, N. F., Sholichah, M., Irianjani, N. D., Rohmah, F. A., Hidayah, N., Junilia, E., Dinni, S. M., Islamiyati, H., Widuri, E. L., Situmorang, N. Z., & Suryani, S. F. (2023). Ragam Intervensi Psikologis Berbasis Komunitas. UAD Press.
- Wirata, G. (2022). Kebijakan Sosial (Kebijakan Pemerintah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan. CV. Pena Persada.
- Zamzami, & Sahana, W. (2021). Strategi Komunikasi Organisasi. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 2(1), 25–37.